

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

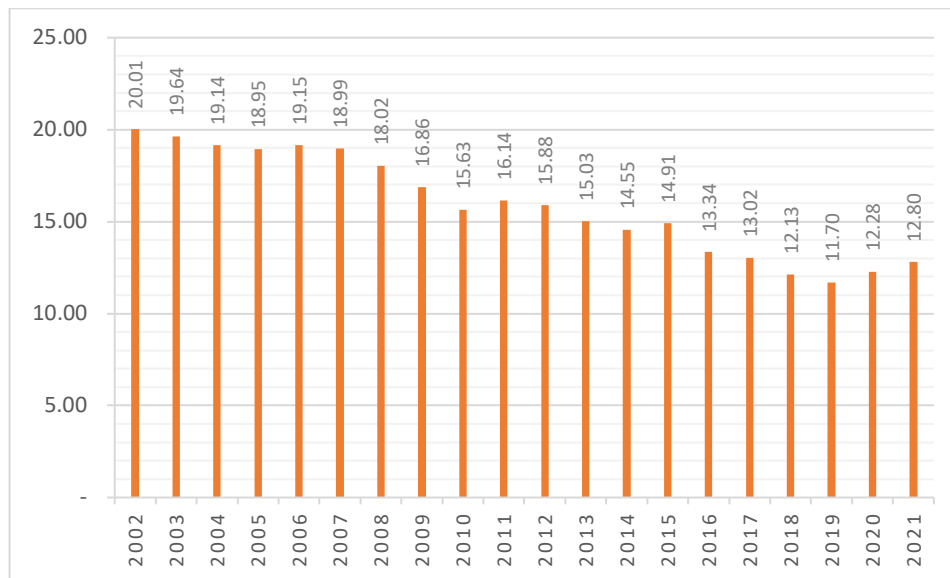
Di zaman sekarang ini, globalisasi telah muncul sebagai isu yang harus menjadi perhatian semua orang, terutama negara-negara di seluruh dunia. Masyarakat mau tidak mau harus berhadapan dengan berbagai persoalan global selama kondisinya tetap sama. Meski demikian, topik pembangunan nasional tetap menjadi topik yang paling perlu digaris bawahi dengan kondisi saat ini. Pertumbuhan suatu bangsa secara keseluruhan memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk politik dan sosial serta ekonomi. Karena pentingnya pembangunan ekonomi bagi perekonomian, suatu negara akan berupaya untuk membuat kebijakan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk mengubah struktur perekonomian yang diharapkan akan mengubah struktur ekonomi menjadi lebih baik (Mahri et al., 2021) .

Indonesia Sebagai negara berkembang memiliki suatu permasalahan kemiskinan mulai dari desa-desa kecil yang miskin, hingga masyarakat kawasan kumuh di perkotaan. Laporan Badan Pusat Statistik tentang jumlah penduduk miskin mengungkapkan disparitas demografis antara Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia. Walaupun pulau jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dari segi jumlah jawa memiliki penduduk miskin terbanyak di Indonesia sebesar 14,02 juta orang (Puspita, 2015). Menurut data BPS Maret 2018, Daerah Istimewa Yogyakarta masih menduduki peringkat ke-23 provinsi termiskin di Indonesia dan merupakan provinsi termiskin di pulau

Jawa, dengan jumlah penduduk miskin 460,00 jiwa. ribu orang. Hal ini menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Dan sampai saat ini, Provinsi Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa sebesar 13,1% (BPS, 2018).

Menurut Ningrum dkk (2020), Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi paling miskin di Pulau Jawa. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional sebesar 11,13 persen, maka angka kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 13,20 persen atau lebih tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan lima provinsi di Jawa lainnya yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di sisi lain, prospek ekonomi Yogyakarta dapat menempatkannya pada posisi yang sama dengan wilayah paling selatan Jawa jika dilihat dari sudut itu. Ini mungkin juga terkait dengan upah minimum wilayah Yogyakarta (UMR) yang ditetapkan sebesar 1,3 juta, yang cukup rendah, dan ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnekertrans). Perkembangan Tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2002-2021 dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.

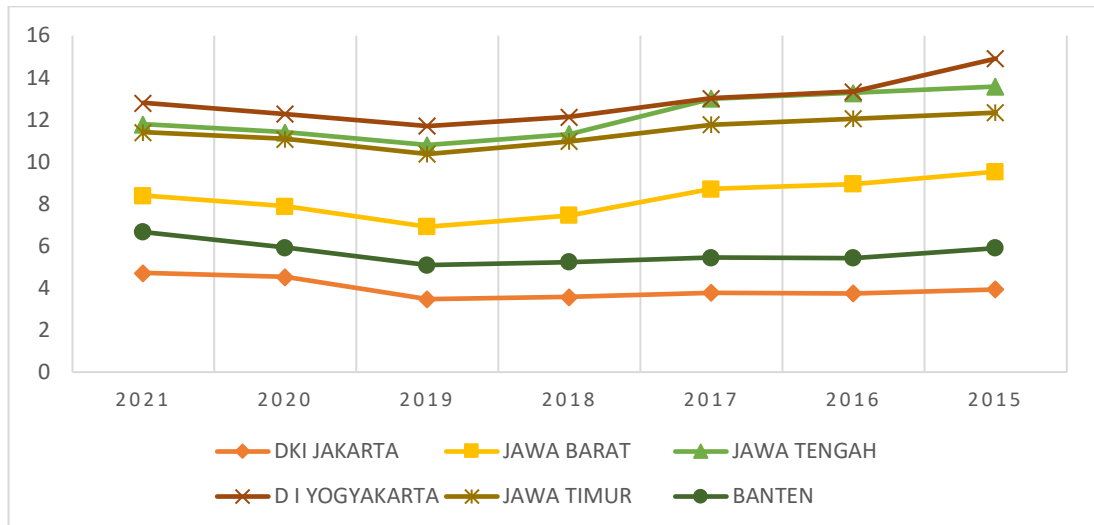
Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta



Sumber : BPS 2022

Dari gambar 1.1 diatas menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi DIY cenderung menurun dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2002, besarnya angka kemiskinan ini terjadi karena keadaan pasca krisis moneter di Indonesia yang terjadi di tahun 1998. Dan tingkat kemiskinan terendah terjadi di tahun 2019 sebesar 11,7 walaupun pada tahun selanjutnya naik Kembali dikarenak wabah covid-19. Walaupun tiap tahunnya mengalami penerunun akan tetapi angka kemiskinan ini masih cukup besar dibandingkan Provinsi di jawa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar tingkat kemiskinan di 6 Provinsi Pulau Jawa sebagai berikut.

Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Pulau Jawa



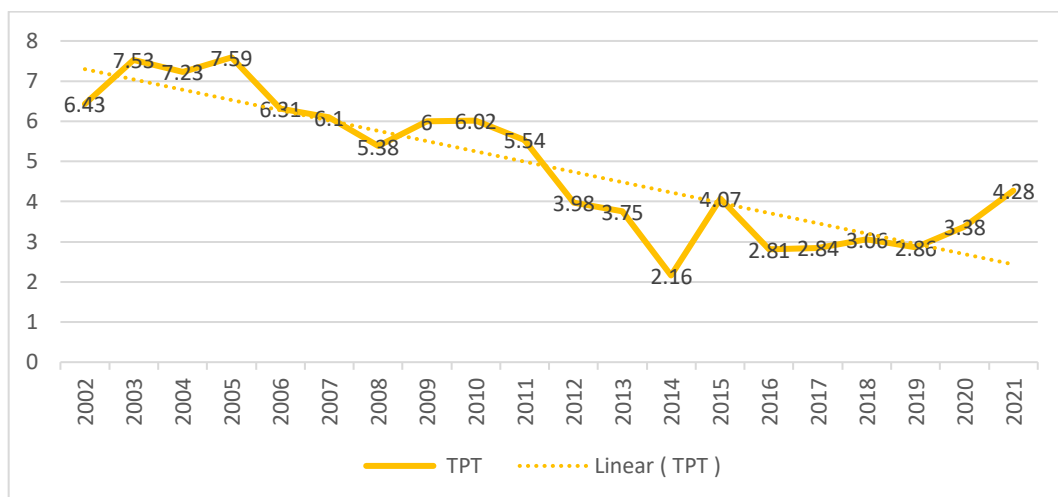
Sumber : BPS 2022

Kemiskinan telah menghalangi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mempersulit untuk mendapatkan perawatan kesehatan, akses terbatas ke layanan publik dll. Walaupun angka kemiskinan cukup tinggi, akan tetapi Provinsi Yogyakarta memiliki indeks pembangunan manusia dengan kategori sangat tinggi bahkan peringkat ke-2 di Indonesia. Menurut, United Nation Development Programme (UNDP) Indeks pembangunan manusia yang sering disebut dengan IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat pembangunan ekonomi. Indikator ini mengukur tingkat kualitas fisik dan non fisik penduduk, seperti indikator tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam hal ini mengartikan bahwa kekayaan bangsa yang sebenarnya terdiri dari rakyatnya (UNDP, 2004).

Menurut BPS (2022), Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat menempati posisi ketujuh terendah di Indonesia jika dibanding dengan daerah lainnya per bulan Februari tahun 2022 ini. Bila dilihat lebih detil ke kabupaten dan kota yang ada di

Yogyakarta, Kota Yogyakarta mencatatkan TPT tertinggi dibandingkan dengan 4 kabupaten yang lain yang ada di Indonesia. TPT Kota Yogyakarta pada Agustus 2017 tercatat sebesar 5,08 persen. Sementara itu TPT terendah di Kabupaten Gunungkidul yang mencapai 1,68 persen. Tiga kabupaten lain yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Sleman mencatat TPT yang bervariasi, masing-masing 1,99 persen; 3,12 persen dan 3,51 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), DIY termasuk daerah yang memiliki TPT terendah di Indonesia. dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.

Gambar 1.2 Perkembangan TPT Provinsi DI Yogyakarta 2002-2021



Sumber : BPS (2022).

Dari gambar 1.3 diatas menunjukan bahwa trend perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Yogyakarta memiliki trend menurun yang berarti dalam periode 20 tahun terakhir tingkat pengangguran semakin sedikit dari tahun ke tahun. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2005, tingginya angka pengangguran ini terjadi pasca krisis ekonomi yang melanda ekonomi nasional. Selepas tahun 2005 terjadi penurunan angka pengangguran secara signifikan, menurut menteri perindustrian penurunan ini terjadi karena terdapat pembangunan

industrialisasi besar-besaran yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru (Sekretaris Jenderal Perindustrian, 2008).

Penciptaan masyarakat yang sejaterah dapat dicapai melalui pertumbuhan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mencapai penghidupan yang lebih baik, dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan (Zamruddin Hasid, 2019). Peningkatan kapasitas fundamental penduduk secara alami mengikuti perkembangan sumber daya manusia, baik sumber daya tersebut dikembangkan secara fisik maupun dengan cara lain. Rakyat perlu memiliki beberapa kualitas mendasar untuk memperluas ruang lingkup peluang yang tersedia untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Raharti et al., 2020). Peningkatan kemampuan fundamental juga dapat dilakukan melalui peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan, dan keahlian yang dimiliki oleh penduduk secara keseluruhan. Hal ini penting karena memiliki potensi untuk mewujudkan masyarakat yang sejaterah dan bebas dari jerat kemiskinan.

Selanjutnya riset ini menganalisis pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta. Provinsi ini memiliki karakteristik yang unik terkait dengan indikator indeks pembangunan manusia yaitu Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Tingkat PDRB perkapita, pengangguran dan kemiskinan. Tingkat indikator IPM yang tinggi D.I. Yogyakarta relatif tinggi, demikian pula tingkat pengangguran di D.I. Yogyakarta terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Akan tetapi rendahnya tingkat pengangguran ini disertai dengan tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas mengenai lama sekolah, Harapan hidup, PDRB perkapita, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan di Provinsi

DI Yogyakarta, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Pengaruh Lama Sekolah, Harapan Hidup Serta PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Analisis Jalur Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah terdapat pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan melalui TPT ?
2. Apakah terdapat pengaruh Umur Harapan Hidup terhadap Kemiskinan melalui TPT ?
3. Apakah terdapat pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Kemiskinan melalui TPT ?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan melalui TPT.
2. Untuk mengetahui pengaruh Umur Harapan Hidup terhadap Kemiskinan melalui TPT.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Kemiskinan melalui TPT.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam Penelitian ini obyek penelitian yang di diteliti oleh peneliti adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tahun mulai dari 2002 - 2021. Selain itu cakupan masalah penelitian ini antara lain.

1. Kemiskinan terdiri dari beberapa indikator yang dihasilkan antara lain garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kesenjangan kemiskinan, keparahan kemiskinan
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
3. Indikator umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Penghitungan UHH dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation). Standardisasi nilai UHH dilakukan dengan konversi menjadi indeks harapan hidup yang dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum UHH yang sesuai

dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

4. Indikator Pengetahuan direpresentasikan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator tersebut merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.
5. indikator standar hidup yang layak di interprestasikan sebagai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Nilai ini didapat dari indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini dapat dihitung hingga tingkat kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Peneliti

Hasil ini diharapkan mampu memperluas cakrawala berpikir dan menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh lama sekolah, harapan hidup serta pdrb per kapita terhadap tingkat kemiskinan melalui analisis jalur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2021.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi tentang pengaruh lama sekolah, harapan hidup serta pdrb per kapita terhadap tingkat kemiskinan melalui analisis jalur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2021.

3. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya.

Penelitian juga dapat bermanfaat khususnya tentang hubungan pengaruh lama sekolah, harapan hidup serta pdrb per kapita terhadap tingkat kemiskinan melalui analisis jalur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2021 sebagai bahan penelitian selanjutnya.